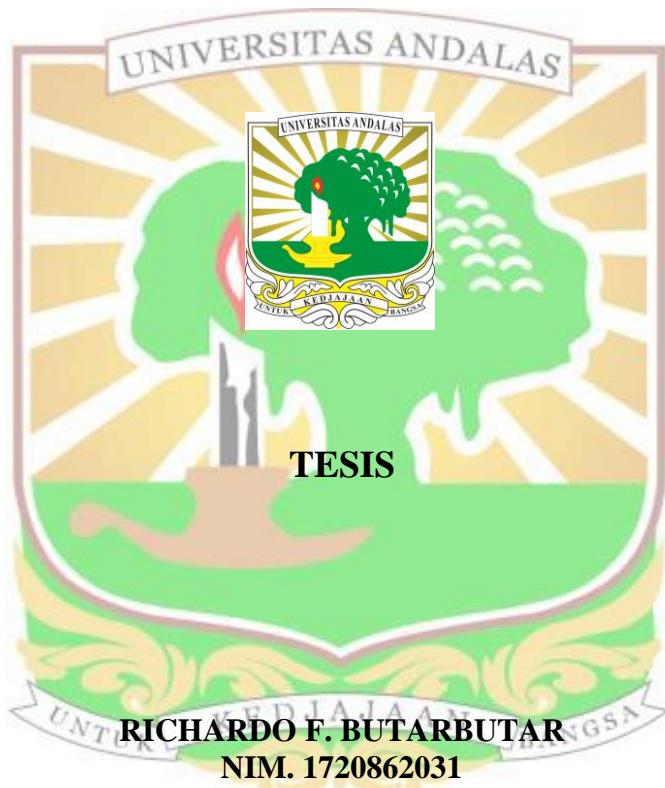


IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH DI KPU KOTA SIBOLGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. JENDRIUS, M.Si

Dr. RIA ARIANY, M.Si



**PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH DI KPU KOTA
SIBOLGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2018**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

**RICHARDO F. BUTARBUTAR
NIM. 1720862031**

**PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

ABSTRAK

Program pendidikan pemilih telah dilaksanakan KPU setidaknya sejak Tahun 2015 dan terus dikembangkan hingga saat ini. Berbeda dengan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kuantitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan, pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilihan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, memberikan kesadaran kepada pemilih agar menjadi pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri, serta tidak terdapat politik uang, mobilisasi massa, politik identitas, berita palsu (*hoax*), dan hal-hal lain yang melawan demokrasi. Outcome dari program ini hingga Tahun 2018 belum menunjukkan gejala perbaikan ditengah-tengah kehidupan politik bangsa Indonesia. Jika melihat fenomena yang terjadi sampai dengan Tahun 2018, peningkatan terhadap upaya-upaya yang bertentangan dengan demokrasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan menjadi isu yang mengancam perpecahan bangsa. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan di kota Sibolga sendiri, isu identitas dan politik uang menjadi satu faktor yang membuat masyarakat terbagi-bagi pada saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Penelitian ini ingin melihat apa yang menjadi penghambat progres pencapaian tujuan program pendidikan pemilih dengan kota Sibolga menjadi gambaran bagaimana pelaksanaan pendidikan pemilih dan melihat apakah program tersebut di implementasi, bagaimana implementasinya, dan apa yang menjadi hambatan serta tantangan dalam proses implementasinya pada masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan pendidikan pemilih di KPU Kota Sibolga pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kota Sibolga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menjelaskan keberhasilan implementasi program melalui faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Pendidikan pemilih, implementasi kebijakan, KPU Kota Sibolga, kesadaran pemilih, kualitas pemilihan.

ABSTRACT

The voter education program has been implemented by the KPU since at least 2015 and continues to be developed until now. In contrast to socialization which aims to increase the quantity of public participation in elections, voter education aims to improve the quality of elections, public participation in elections that are in accordance with democratic values, provide awareness to voters to become rational, intelligent and independent voters, against money politics., mass mobilization, identity politics, fake news (hoax), and other things that oppose democracy. The outcome of this program until 2018 has not shown any signs of improvement amidst the political life of the Indonesian nation. If you look at the phenomenon that has occurred up to 2018, the increase in efforts that are contrary to democracy has increased very significantly and has become an issue that threatens the division of the nation. This phenomenon occurs in almost all regions of Indonesia, even in the city of Sibolga itself, the issue of identity and money politics is one factor that makes the community divided during the 2018 North Sumatra Governor Election. with the city of Sibolga to illustrate how voter education is implemented and see whether the program is implemented, how it is implemented, and what are the obstacles and challenges in the implementation process during the election stages for the Governor and Deputy Governor of North Sumatra in 2018. This research uses a qualitative approach with analysis descriptive. Data was collected using interview methods and document collection related to the implementation of voter education at the KPU of Sibolga City at the stage of holding the 2018 Governor and Deputy Governor elections in Sibolga City. The theory used in this research is Edward III's (1980) policy implementation theory which explains the successful implementation of the program through communication factors, resources, dispositions, and bureaucratic structures.

Keywords: Voter Education, Policy Implementation, KPU Kota Sibolga, Voter Awareness, The Quality of Election.